



SBI Sesuaikan Pungutan

Lewat Kesepakatan dengan Orang Tua Siswa

JOGJA - Implementasi BOS mulai awal tahun ini memberikan efek pada sekolah bertaraf internasional (SBI). BOS tidak mengizinkan sekolah memungut biaya tambahan dari siswa. Namun SBI mendapat kelonggaran. Pengelolaan program internasional membutuhkan biaya tambahan. Oleh karena itu, partisipasi dari orang tua siswa diizinkan.

Diknas memang mengizinkan partisipasi para orang tua siswa, namun sifatnya harus sukarela dan tidak mengikat. Beberapa

SMP negeri di Kota Jogja yang menyelenggarakan kelas internasional menerapkan nominal pungutan melalui kesepakatan pihak orang tua dengan sekolah.

Kepala SMP Negeri 5 Jogja Suparno mengatakan, partisipasi orang tua siswa kelas internasional adalah hasil kesepakatan kedua pihak. "Sekolah kan dilarang memungut apa pun dari siswa. Jadi ini bentuknya kesepakatan," tuturnya kepada Radar Jogja kemarin.

Meskipun mengakui partisipasi dari orang tua siswa kelas internasional dibutuhkan, Suparno tidak sepakat jika hal itu memberatkan orang tua siswa.

► Baca SBI... Hal 13

Berharap Pencairan BOS dan BOSDA Lancar

■ SBI

Sambungan dari hal 3

Menurutnya, sebagian besar kebutuhan kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa dicukupi dari BOS pusat sebesar Rp 575 ribu dan BOSDA sebesar Rp 625 ribu per tahun untuk setiap siswa.

"Sejauh ini kami hitung-hitung, jumlah pungutan siswa tidak terlalu banyak. BOS dan BOSDA mencukupi sebagian besar kebutuhan," paparnya. Dana BOS akan diprioritaskan untuk efektifitas KBM dan gaji guru honorer.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala SMP Negeri 8 Jogja Pardi HS menyampaikan sampai saat

ini pihaknya belum mendapat pedoman baru tentang aturan pungutan siswa kelas internasional. Jumlah pungutan didasarkan pada hasil kesepakatan orang tua murid dan sekolah sebesar Rp 125 ribu.

"Sementara ini kami akan pakai nominal itu dulu (Rp 125 ribu). Para wali tidak protes karena biaya operasional kelas internasional memang berbeda," ujarnya. Pungutan tambahan itu digunakan untuk KBM dan pemenuhan fasilitas tambahan.

Pada prinsipnya, dana BOS, BOSDA, dan iuran akan digunakan seefektif mungkin. Pardi mengaku jika pembatasan iuran berpengaruh terhadap berbagai

program sekolah dan kegiatan siswa. Tetapi, beberapa program yang dianggap kurang mendesak bisa ditunda pelaksanaannya.

"Sekarang yang menjadi fokus kami adalah persiapan Ujian Nasional bagi kelas IX. Program dan kegiatan lain bisa dikompromikan, asal bukan persiapan UN," tambahnya.

Kepala Diknas Kota Jogja Zamsuri membenarkan adanya larangan sekolah memungut iuran tambahan kepada siswa. "Untuk iuran tambahan bagi sekolah bertaraf internasional, kami juga akan mengawasi besarnya," paparnya.

Zamsuri tidak menampik munculnya kekhawatiran dari beberapa orang tua siswa dengan

adanya BOS. "Takutnya BOS malah akan mengurangi kualitas pendidikan. Soalnya biayanya murah, jadi dikhawatirkan sekolah asal jalan tanpa peduli kualitas," ungkapnya.

Oleh karena itu BOSDA dikeluarkan. "Jumlah BOSDA sebesar Rp 625 ribu. Semoga bisa menutupi kekurangan BOS pusat," imbuhnya.

Suparno dan Pardi HS berharap BOS dan BOSDA lancar. "Yang kami tunggu sih pencairannya lancar," ujar Pardi HS. Seandainya pencairan BOS telat pada bulan-bulan awal, mereka mengaku masih bisa maktum. "Tapi jangan sampai telatnya kebablasan," tandas Suparno. (luf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005